



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHENDRA
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 950700

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 415.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di KAB / KOTA AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11BF1DA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA13TRANSMOVERMT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VEGA R NEW Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 560.795.000

III. HUTANG Rp. 226.661.454

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 334.133.546

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.